BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, meskipun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada masa yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan menjadi polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara lain. Penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah Negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prike-manusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.¹

Menurut Asmara Nababan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi mengemukakan, “Sudah saatnya esensi dari perubahan konstitusi ini diperdebatkan. Apa masih layak kita menghukum mati seseorang bila UUD 1945 sebagai hukum tertinggi Negara ini

¹ M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. 2009. hlm.61

menegaskan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.²

Menurut Hegel, Negara ialah realitas “*Roh*” atau kesadaran, yang menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan.³ Menyikapi permasalahan dan pertentangan yang terjadi di dalam pembaharuan hukum pidana, Negaralah yang harus mengambil kebijakan guna mencegah terjadi pertentangan yang semakin meluas yang bukannya mendatangkan solusi melainkan melahirkan debat kusir yang tak bermakna.

Pro dan kontra atau pertentangan pendapat yang masih terus berlangsung dalam domain hukum pidana sebagaimana tersebut di atas ialah mengenai keberadaan lembaga pidana mati baik dalam kedudukan sebagai hukum positif maupun dalam upaya pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari hukuman (pidana). Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, Pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama. Perdebatan muncul ketika banyak orang yang mulai menanyakan apakah pidana mati masih layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia.

Sebagaimana diketahui eksistensi lembaga pidana mati dituangkan dalam KUHP, yang secara terperinci dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 10 pidana terdiri atas:

² http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140.di akses pada jam 10.00 WIB, tanggal 04-04-2012

³ Darsono P, *Karl Marx Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 21.

1. Pidana pokok :

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara,
- c. Kurungan,
- d. Denda.

2. Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu,
- c. Pengumuman putusan hakim,⁴
- d. Pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan
- e. Pembayaran ganti rugi

Berdasarkan uraian pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa lembaga pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman (pidana) yang dapat dijatuhkan.

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam KUHP Bab 2 Pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri.

Memang tidak ada suatu keharusan untuk menerapkan hukum pidana

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 5-6.

di Indonesia harus seutuhnya sama dengan Negara yang menjadi kiblat hukum pidana nasional kita, namun karena pidana mati berkaitan dengan hak hidup seseorang maka tentu menimbulkan pertentangan yang melahirkan pro kontra atau silang pendapat antara para ahli hukum pidana yang sampai pada saat ini belum jelas akhirnya. Wajar pertentangan tersebut muncul, namun perlu sekali lagi digaris bawahi bahwa Negara tentu mempunyai pertimbangan khusus memberlakukan pidana mati dalam hukum pidana kita sebagaimana tertuang dalam pasal 10 huruf a angka 1 KUHP tersebut.

Simons dalam sebuah tulisannya pernah menyatakan, masalah adil-tidaknya hukuman mati itu tidaklah dapat dipersoalkan, apabila sudah jelas bahwa tanpa hukuman tersebut ketertiban hukum tidak dapat dipertahankan.⁵ Maka berdasarkan pendapat Simons tersebut jelas di sini bahwa keberadaan lembaga pidana mati merupakan kebutuhan yang mutlak pada saat itu, mengingat keberadaan Negara Indonesia yang belum stabil saat itu dan bila dilihat dari segi adat istiadat di Indonesia, hukuman (pidana) mati tidaklah bertentangan dengan adat istiadat dan hukum agama, khususnya hukum pidana Islam yang juga mengenal adanya hukuman mati (yang mana mayoritas Warga Negara Indonesia merupakan penganut agama Islam).

Hukuman mati di beberapa Negara modern sudah dihapuskan, namun keberadaanya di Indonesia masih dipertahankan, dengan catatan pemberlakuannya harus ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam pemberian hukuman apabila hukuman pokok diperkirakan tidak bisa lagi

⁵ P.AF. Lamintang & D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm. 393.

memperbaiki si pelaku. Hukuman mati dilakukan secara selektif dan selalu diberikan hukuman alternatif. Hukuman mati disebut sebagai hukuman yang kontroversial alasannya berhubungan dengan hak hidup seseorang. Hak hidup adalah salah satu hak yang paling dasar (asasi) yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Di Indonesia sendiri, aturan yang berhubungan dengan HAM di legalisasikan dalam UU RI No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pemerintah, Negara dan hukum wajib menghormati, menjunjung tinggi hak yang melekat pada setiap manusia sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan harkat dan martabat manusia sehingga pemberlakuannya harus selektif dan tidak boleh gegabah.

Penjatuhan pidana mati tersebut, tidaklah dijatuhkan kepada sembarangan orang melainkan khusus kepada pelaku kejahatan khusus (*extraordinary crime*), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup⁶ (baca dipidana mati). Salah satu tokoh yang mendukung keberadaan lembaga pidana mati di negeri ini ialah ialah R. Santoso Poedjosoebroto yang merupakan mantan wakil ketua Mahkamah Agung, berpendapat pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan,⁷ namun dalam penjatuhan pidana mati haruslah diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak si

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105.

⁷ Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 57.

terpidana dan eksekusinya pun dilakukan dengan cara yang patut dan berprikemanusiaan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD NRI 1945 dan sejarah konstitusi Indonesia tidak dimaksudkan sebagai hak yang mutlak dan *Underogable*. Selain itu, instrument *Internasional Covenant on Civil Political Rights* tetap mengakomodir hukuman mati sepanjang dipandang oleh negara anggota kovenan sebagai kejahatan yang paling serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan arahan agar konstruksi pidana mati ke depan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.⁸

Ada beberapa perundang-undangan dalam pidana khusus yang

⁸ Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung , hlm. 156-157

menerapkan sanksi pidana mati, diantaranya :

1. Dalam UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dijatuhkan. Penjelasan Pasal 2 (2) menyatakan, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberantas bagi pelaku tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

2. UU RI No 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika, yaitu pada :

Pasal 80 (1) a

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah).

Pasal 80 (2)

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 80 (3)

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 81 ayat (3) a

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 82 ayat (1) a

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum: mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 82 ayat (1) b

Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (1) c

Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (2) a

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 82 ayat (3) a

Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

3. UU RI No 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu pada :

Pasal 59 ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu:

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 setiap orang yang :

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.
- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau merusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau mengagalkan pekerjaanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru.
- d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru.
- e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian

- kepunyaan orang lain.
- f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara.
 - g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak.
 - h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan.
 - i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan.
 - j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.
 - k. Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
 - l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut.
 - m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan.
 - n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan di tempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan.
 - o. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan, lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n.
 - p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam

- penerbangan.
- q. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara, dalam penerbangan.
 - r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
 - s. Pasal 9, setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas Internasional.

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang diluar wilayahnya Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama

sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

5. UU RI No 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu pada:

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,b,c,d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a,b,c,d,e atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42 ayat (3), perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.

Alasan utama penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kenyataannya, pidana mati tidak mampu mencegah kejahatan tetapi justru lebih mencerminkan sebuah kebrutalan. Dalam pandangannya, seseorang tidak dapat mengorbankan kehidupannya sendiri, sehingga oleh karena itu tidak ada pula seorang pun yang dapat memberikan suatu kehidupan (hak hidup) ataupun kematian (hak mati) kepada sesamanya. Karena hidup adalah hak paling dasar yang dimiliki setiap manusia secara

kodrati sebagai anugerah/pemberian Tuhan Yang Maha Esa.⁹

Tidak dapat dipungkiri masih banyak ahli yang tak sependapat dengan hal tersebut, namun keberadaan lembaga pidana mati haruslah dihargai dalam kedudukannya sebagai suatu bagian dari hukum pidana positif Indonesia. Selain Sahetapy, masih banyak ahli yang menentang atau kontra terhadap eksistensi lembaga pidana mati (namun tidak sepenuhnya menentang konsep pidana mati yang tertuang RKUHP) di Indonesia yang salah satunya adalah Sudarto yang berpendapat: “Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. Adakah alasan yang cukup kuat untuk menghilangkan nyawa manusia itu sendiri? Kekeliruan dari pengadilan selalu dapat terjadi, dan kalau hal ini terjadi dalam penjatuhan hukuman mati, maka tidak ada kemungkinan lain sama sekali untuk memperbaiki. Manfaat dari pidana ini sangat diragukan.”¹⁰

Keberadaan pidana mati bukan hanya menjadi sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia namun juga terjadi di banyak Negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Von Henting yang secara terang-terangan menolak mengenai keberadaan lembaga pidana mati. Beliau berpendapat, ada pengaruh yang kriminogen dari pada pidana mati ini terutama sekali disebabkan karena Negara telah memberikan suatu contoh yang jelek dengan pidana mati tersebut sebenarnya Negaralah yang berkewajiban untuk

⁹ Cesare Beccaria sebagaimana dikutip oleh Soedarto dalam tulisannya berjudul Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 22.

¹⁰ *ibid*, hlm. 11

mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah eksistensi pidana mati dalam konsep rancangan undang-undang KUHP ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan ini, sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana mati di dalam hukum pidana Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui eksistensi pidana mati dalam konsep rancangan undang-undang KUHP.
2. Manfaat Penulisan ini, sebagai berikut:
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan tentang penerapan sanksi pidana mati dalam system pemidanaan di Indonesia ditinjau dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim

¹¹ *ibid.*, hlm. 127.

dalam dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sistem Pidana dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim. Dapat pula dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara kongkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana. Tujuan pidana adalah sebagai berikut.¹²

- a. Pembalasan (*revenge*)
- b. Penghapusan dosa (*Expiation*)
- c. Menjerakan (*deterrent*)
- d. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)
- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Alasan Pidana digolongkan dalam 3 (tiga) golongan pokok, yaitu teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan, antara lain :

- a. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.81

moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori *absolut* atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu berencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat pembalasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja

tidak akan memadai, melainkan diperlukan pejatuhan pidana kepada si penjahat. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu :

- 1) Untuk menakuti, teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.
- 2) Untuk memperbaiki, hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*Speciale Prevensi* atau pencegahan khusus).

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*Generale Prevensi* / pencegahan umum).

c. Teori Gabungan

Pemidanaan dalam perpaduan teori pembalasan dan teori tujuan, disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, pelaku tindak pidana itu sendiri maupun kepada masyarakat.¹³

¹³ Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif*

Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. Menjerakan penjahat;
- b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- c. Memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹⁵

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, hukuman mati merupakan hukuman pokok terberat dibanding hukuman-hukuman pokok yang lain. Sementara itu hukuman mati adalah ganjaran bagi sebuah tindak pidana berat dengan menghilangkan nyawa terpidana, baik melalui pelaksanaan tembak mati, seperti di Indonesia atau digantung, disuntik, dipenggal dan sebagainya.

Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Analisis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya. Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya atau penelaahan

Hukum Dan Masyarakat, Revika Adilama, Bandung, hlm. I 05.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 124

bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman makna keseluruhan.

- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁶
- c. Pengertian Pidana Mati dapat diartikan bahwa suatu permasalahan yang sangat mendasar dan seyogianya jangan dikaitkan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Sekali dikaitkan pidana mati berdasarkan apakah perbuatan itu sangat kejam, kurang, atau tidak sadis, kurang, atau tidak berperikemanusiaan.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam hal ini penulis memilih penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum.¹⁸

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Data yang dipergunakan oleh penulis adalah bahan hukum primer yaitu

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 55

¹⁷ J.E.Sahetapy. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.hlm.119- 120

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta , 2011, hlm. 96

meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUKHP)
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001
 - 8) Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
 - 9) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.¹⁹
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta , 2004, hlm. 103.

seperti kamus hukum, ensklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus teliti dan tepat untuk menemukan data untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari study kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi. Diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus.

²⁰ *Ibid*